

KOORDINASI DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KUWU KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN

Christine Diah Wahyuningsih *)

*) Dosen akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus Semarang

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh koordinasi, pengawasan dan koordinasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui sejauhmana Koordinasi. Pengawasan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Tipe penelitian ini adalah explanatory dengan sampel diambil secara *Random Sampling* Tehnik pengolahan data meliputi editing, coding dan tabulating serta dalam menganalisa data menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: perhitungan uji hipotesis variabel koordinasi dan implementasi PKH menggunakan perhitungan korelasi product moment dapat diketahui bahwa nilai $r_{x_1y}=0,307$ kurang dari nilai r_{tabel} 0,316. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif antara pengaruh koordinasi terhadap keberhasilan implementasi PKH di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Perhitungan uji hipotesis variabel pengawasan dan keberhasilan implementasi PKH menggunakan perhitungan korelasi product moment dapat diketahui bahwa nilai $r_{x_2y}=0,811$ melebihi dari nilai r_{tabel} 0,316. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh pengawasan terhadap keberhasilan implentasi PKH di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, Dari hasil perhitungan korelasi product moment diketahui bahwa nilai $r_{(x_1, x_2)y}=0,259$ kurang dari nilai r_{tabel} =0,367 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara koordinasi dan pengawasan terhadap keberhasilan implementasi PKH di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Kata Kunci : Koordinasi, Pengawasan, Implementasi, Program PKH

ABSTRACT

The problem in this research is: What is the effect of coordination, supervision and coordination in the implementation of the Family of Hope Program in Kuwu Village, Kradenan District, Grobogan Regency. The purpose of the research is to find out the extent of coordination. Supervision in the Implementation of the Keluarga Harapan Program This type of research is explanatory with samples taken by Random Sampling Data processing techniques include editing, coding and tabulating as well as analyzing data using qualitative and quantitative analysis.

The results obtained in this research are: the calculation of the coordination variable hypothesis test and the implementation of PKH using the product moment correlation calculation can be known that the value of $r_{x_1y}=0.307$ is less than the value of r_{tabel} 0.316. Thus it can be concluded that there is a negative

Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang, Volume 19 No. 2 Oktober 2022
influence between the influence of coordination on the success of PKH implementation in Kuwu Village, Kradenan District, Grobogan Regency. The calculation of the hypothesis test of supervision variables and the success of PKH implementation using the product moment correlation calculation can be seen that the value of $r_{xy}=0.811$ exceeds the value of $r_{tabel} 0.316$. Thus, it can be concluded that there is a positive and significant influence between the influence of supervision on the success of PKH implementation in Kuwu Village, Kradenan District, Grobogan Regency. From the results of the product moment correlation calculation, it is known that the value of $r(x_1 x_2)=0.259$ is less than the value of $r_{tabel}=0.367$. it can be concluded that there is no influence between coordination and supervision on the success of PKH implementation in Kuwu Village, Kradenan District, Grobogan Regency.

Keywords: Coordination, Supervision, Implementation, PKH Program

Latar Belakang

Tingginya angka kemiskinan menyebabkan belum berhasilnya upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin. Krisis multidimensional yang masih di hadapi bangsa Indonesia, masalah kemiskinan semakin meningkat dan dikaji secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus menerus meningkat di setiap tahunnya, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat nya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara negara maju. Data BPS, pada Maret 2020 jumlah penduduk Indonesia yang terdeteksi ada di bawah garis kemiskinan mencapai 26,42 juta orang atau 9,78% dari jumlah total Penduduk Indonesia yang menyebar di berbagai provinsi yang ada. Presentasi tersebut meningkat 0,56% atau 1.63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% atau 1,28 juta orang terhadap poin terhadap Maret 2019 BPS, 2020).

Untuk meminimalisir masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari kehari maka Pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini

dilaksanakan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu Instansi pemerintahan yang bergerak dibidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Pemerintah berharap dengan adanya pemberdayaan ini, Para peserta program bisa segera mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri untuk lepas dari kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan yang tak kunjung tuntas. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, yang bisa akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat program keluarga harapan juga mulai didorong untuk mencakup Penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan Taraf kesejahteraan sosial nya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita presiden RI.

Program Keluarga Harapan sendiri mulai masuk di wilayah Kabupaten Grobogan sejak tahun 2014 dan masih berlanjut sampai dengan sekarang. Meskipun demikian, sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Tabel I.1

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan

Tahun	Jumlah (jiwa)	Persentase
2014	186.500	13,86
2015	184.500	13,68
2016	184.100	13,57
2017	180.900	13,27
2018	168.700	12,31
2019	161.921	11,77

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan tahun 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk miskin semakin tahun semakin menurun, akan tetapi semakin tahun jumlah keluarga peserta PKH atau jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan tahun semakin tahun semakin bertambah. pada tahun 2014 jumlah peserta PKH adalah 24.468 KPM, dan pada tahun 2020 jumlah tersebut naik menjadi 63.807 KPM yang tersebar di 19 Kecamatan, termasuk salah satunya di Kecamatan Kradenan. Program keluarga harapan lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program ini merupakan bantuan bersyarat dan disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) Setidaknya ada 10 komponen tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dimana sepuluh poin dari tujuan tersebut mendukung keberhasilan PKH , yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan,

meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia di bidang kesehatan.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta anitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara.

Dengan PKH diharapkan peserta PKH (selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, Ketidak berdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban yang di bidang kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan,

pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita. Di bidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan(SD s.d SMA). Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah anak khususnya SD dan SMA .

Secara umum, persoalan yang menjadi hambatan dalam program PKH ini disebabkan oleh beberapa indikasi, yaitu : pertama, mengenai kevalidan data kelayakan peserta PKH. Masyarakat mengeluhkan adanya ketidaktepatan peserta PKH, seperti adanya peserta atau calon peserta PKH yang dinilai bukan KPM, sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat KPM yang tidak terdata atau tidak masuk sebagai calon peserta PKH. Kedua, mengenai besarnya bantuan yang diterima. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan adanya indikasi pemotongan penyaluran bantuan. Hal tersebut dikarenakan besarnya bantuan yang diterima berbeda dengan jumlah bantuan tahap sebelumnya. Ketiga, lambatnya penyaluran dana PKH kepada peserta. Masyarakat mengeluhkan keterlambatan penerimaan dana PKH yang tidak sesuai jadwal yang seharusnya diberikan. Kelima, dana PKH yang diberikan tidak cukup untuk membiayai pendidikan anaknya. Apalagi di masa pandemic Covid-19 ini dimana pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran daring dan membutuhkan biaya tambahan untuk mengakses internet. Berdasarkan permasalahan diatas kami tertarik untuk meneliti tentang: Pengaruh Koordinasi dan Pengawasan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Kerangka Teori

Koordinasi (Variabel X₁)

Dalam tinjauan manajemen, koordinasi menurut G.R Terry meliputi : Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni :

1. *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
2. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba.
3. *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de Corps*, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.¹

Koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut : Koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen dengan kata lain bahwa koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Sebagai fungsi organik, pimpinan memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi organik lainnya. Dikatakan khas karena fungsi koordinasi mencakup pula ungsi fungsi lainnya, seperti: perencanaan, staffing, motivasi, pengawasan dan lain sebagainya. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai macam komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan (friction) yang

timbul antara komponen dalam organisasi yang sama dan mengusahakan semaksimal mungkin kerja sama diantara komponen-komponen tersebut.

Koordinasi merupakan usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Jelasnya koordinasi mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) dan keserasian serta kesimultanan (sinkronisasi) seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi. Hal ini sesuai dengan prinsip; koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Dikatakan sebagai faktor dominan karena kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu ditentukan oleh kualitas usaha-usaha koordinasi yang dijalankan. Karena itu seorang pemimpin dikatakan sebagai pimpinan yang berhasil apabila ia dapat melakukan koordinasi dengan baik. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan terus-menerus, karena masalahnya bukan hanya masalah teknik semata-mata, tetapi juga tergantung dari sikap, tindakan dan langkah dari pemegang fungsi organik sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Koordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kebutuhan koordinasi menurut Stoner dan Wankel dapat dibedakan menjadi 3 variasi yaitu: Kebutuhan Koordinasi atas ketergantungan kelompok (*pooled interdependence*). Kebutuhan Koordinasi atas ketergantungan sekuensial (*pooled interdependence*). Kebutuhan Koordinasi atas ketergantungan

timbalbalik (*reciprocal interdependence*) dengan tujuan :

- 1) Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- 2) Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- 3) Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- 4) Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
- 5) Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Pengawasan (Variabel X₂)

Menurut prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.² Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen.

Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanakan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan

adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Soekarno dalam Gouzali saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
- d. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Pengawasan (controlling) sebagai fungsi manajemen bila dikerjakan dengan baik, akan menjamin bahwa semua tujuan dari setiap orang atau kelompok konsisten dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini membantu

meyakinkan bahwa tujuan dan hasil tetap konsisten satu sama lain dengan tujuan organisasi. Proses pengendalian mulai dengan perencanaan sampai pencapaian tujuan penampilan kerja. Tujuan penampilan kerja untuk mengukurnya maka disusunlah standar-standar capaian, ada dua tipe standar:

1. Standar output (keluaran), berfungsi untuk mengukur hasil-hasil tampilan dalam istilah kuantitas, kualitas, biaya atau waktu.
2. Standar input (masukan) berfungsi untuk mengukur usaha-usaha kerja yang masuk kedalam tugas.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan umum program keluarga harapan (PKH) adalah untuk

- a. mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan,
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta
- c. merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM.

Tujuan PKH meliputi 5 hal yaitu :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan

dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya *bargaining* (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian tersebut merupakan pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya. Kemiskinan juga menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Salah satunya definisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis Nol (H_0), Yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Hipotesis Alternatif (H_a), Yaitu hipotesis yang menyatakan adanya

pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lain.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Explanatory (Penjelasan) untuk menguji hipotesa penelitian. Populasi dan Sampel Penelitian diambil secara random seperti table berikut :

Kerangka sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

RW	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
RW I	13	3
RW II	31	9
RW III	14	7
RW IV	53	5
RW V	80	7
RW VI	113	8
Jumlah	304	39

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara : Observasi, Kuesioner / Daftar Pertanyaan. Dokumentasi. Teknik Pengolahan data melalui tahapan : Editing. Coding. Tabulating. Pengujian Hipotesis menggunakan alat bantu statistic Korelasi Product Moment Angka Kasar untuk mengetahui pengaruh antar variable Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$r = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{(N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)\}}}$$

sementara itu ntuk mengetahui seberapa besar pengaruh (sumbangan) variabel pengawasan pendamping (X2) terhadap variabel keberhasilan PKH (Y) dalam ukuran persen, maka digunakan rumus koefisien determinasi (KD) sebagai berikut: $KD = (r_{X2Y})^2 \times 100\%$

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Koordinasi (X1) Terhadap Keberhasilan PKH (Y) di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

$$r_{X1Y} = \frac{1}{\sqrt{x_1}} \frac{d}{dx_1} f(x_1, y)$$

$$= \frac{3,3}{\sqrt{(1,7)(9,5)}} = \frac{3,3}{1,14} = 0,306$$

Pengaruh Koordinasi Terhadap Keberhasilan PKH nilainya $r_{X1Y} = 0,306$, selanjutnya nilai tersebut dikonsultasikan dengan r tabel dengan N= 39 pada taraf signifikasi 5% diketahui nilai r tabel adalah $0,306 < 0,316$. Jadi hipotesis ditolak.

Pengaruh Pengawasan (X2) Terhadap Keberhasilan PKH (Y)

$$r_{X2Y} = \frac{\sum X_2 Y}{\sqrt{(\sum X_2^2)(\sum Y^2)}} = \frac{7,0}{\sqrt{(1,0)(9,5)}} = \frac{7,0}{4,6} = 0,811$$

$r_{X2Y} = 0,811 > 0,316$. Hipotesis diterima.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh (sumbangan) variabel pengawasan pendamping (X2) terhadap variabel keberhasilan PKH (Y) dalam ukuran persen, maka digunakan rumus koefisien determinasi (KD) sebagai berikut:

$$KD = (r_{X2Y})^2 \times 100\% = (0,811)^2 \times 100\% = 0,657721 \times 100\% = 65,77\%$$

Pengaruh Koordinasi Dan Pengawasan Terhadap Keberhasilan Implementasi PKH di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

$$r_{X1X2} = \frac{\sum X_1 X_2}{\sqrt{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2)}} = \frac{1,0}{\sqrt{(1,7)(1,0)}} = \frac{1,0}{1,56} = 73,58$$

Maka diperoleh hasil sebagai berikut untuk mengolah korelasi ganda (R)

$$r_{1Y} = 0,306 \rightarrow 0,31$$

$$r_{2Y} = -0,811 \rightarrow -0,81$$

$$r_{1X2} = 73,58 \rightarrow 73,58$$

R (X₁X₂)y

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(0,3 \cdot 0,8) - [(0,3)(0,8)(7,5)]}{\sqrt{[(0,3)^2 + (0,8)^2] - [2(0,3)(0,8)(7,5)]}} \\
 &= \frac{(0,24) - (1,8)}{\sqrt{0,73 - 3,6}} \\
 &= \frac{-3,36}{\sqrt{-2,87}} \\
 &= \frac{-3,36}{-1,69} \\
 &= 0,259
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan korelasi ganda dapat diketahui nilai “r” hasil yang menggambarkan “Pengaruh Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Keberhasilan PKH r_{x₁x₂y} = 0,259, < 0,316. Hipotesis ditolak

Kesimpulan

1. Pengaruh Koordinasi Terhadap Keberhasilan implementasi PKH nilainya r_{x₁y} = 0,306, < 0,316. Hipotesis dinyatakan ditolak dengan koefisien Determinasi sebesar 9,36% yang berarti pengaruh Koordinasi terhadap keberhasilan Implementasi PKH di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sebesar 9,36%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Pengaruh Pengawasan Terhadap Keberhasilan Implementasi PKH nilainya r_{x₂y} = 0,811 > 0,316. Hipotesis dinyatakan di terima dengan koefisien Determinasi sebesar 65,77%, yang berarti pengaruh pengawasan terhadap keberhasilan implementasi PKH di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sebesar 65,77%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain.

3. Pengaruh Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Keberhasilan Implementasi PKH nilainya r_{x₁x₂y} = 0,259 < 0,316. Hipotesis dinyatakan di tolak dengan koefisien Determinasi sebesar 6,7%, yang berarti Koordinasi dan Pengawasan terhadap variabel keberhasilan implementasi PKH sebesar 6,7%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain.

Rekomendasi

1. Kemampuan masyarakat menyelesaikan kesalahpahaman dalam pelaksanaan PKH memerlukan arahan atau bantuan dari fasilitator desa, aparatur desa serta pendamping PKH dengan menyelesaikan secara musyawarah yang membahas mengenai pelaksanaan PKH di masyarakat sehingga masyarakat dalam pelaksanaan PKH tidak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman.
2. Kepala Desa perlu memberikan teguran kepada masyarakat apabila terjadi kesalahan penerima KPM dan memantau atau mengawasi jalannya pelaksanaan PKH

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Saiful, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Glora Madani Press
- Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal :9
- Atmosudirjo, Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Auliyah Husnah, Hermawan dan Abdul Wachid. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan*

- Program Penanggulangan Kemiskinan Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) Sebagai Upaya Mendukung Pencapaian Target MDG's (Millenium Development Goals) Di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Crisis Center Pendampingan Provinsi Jawa Timur). JAP Vol 1, No 3, 9-17
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Analisis Indikator Kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2017*, (Demak : BPS Kabupaten Demak – CV. Citra Yunda, 2017), hal.24
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta:BPFE
- Hasibuan, Malayu, S.P, (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hal 85
- Hedjrahman Ranupandojo, dan Suad Husnan, 2000, *Manajemen Personalialia*, Edisi 4, Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23831/Chapter%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- <https://www.grobogan.go.id/info/berita-terbaru>
- <https://www.jogloabang.com/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan>
- Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2015), hal.2
- Koentjaraningrat. 1973. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: LIPI
- Masri Singarimbun dan Sofian Hadi, *Metode Penelitian survei*, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Masri Singarimbun dan Sofian Hadi.1984. *Metode Penelitian survei*. Jakarta:LP3ES
- Moh. Nazir, Ph.D. 2003. *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Progam Keluarga Harapan, *Meraih Keluarga Sejahtera*, t.t.p., t.p, 2019., hal.1
- PT. Rineka Cipta. 2002
- Rinaldi A Thal, 2010, *Resiliensi pada Masyarakat Kota Padang Ditinjau dari Jenis Kelamin*.Jurnal Psikologi Vol. 3. No. 2, 1-7
- Rusdiana dan Ghazin, 2014. *Asas-asas Manajemen Berwawasan Global*. Pustaka Setia, Bandung.
- S. Suria Sumantri, Jujun. 1998. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Dikdasmen
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*.Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekarno, dalam Gaouzali, Saydam. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Mikro)*. Jakarta: Djembatan.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* ,CV.Alfabeta: Bandung 2009
- Susi L. dan Rita Y.I 2012. *Analisis Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan 7*, 71-87
- Sutrisno Hadi, Prof. Drs. MA, *Metode Reserch*, Penerbit ANDI, jilid 1, Yogyakarta, 2000
- Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekon, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Induk Provinsi Papua*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 80
- Terry,G.R dalam hasibuan.2006. *Prinsip Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tim BPS. 2019. *Statistik Daerah Kabupaten Grobogan 2019*. Hlm. 9.

Tim BPS. 2019. Potret Pendidikan

Statistik Indonesia. Hlm. 100

Tim BPS. 2019. Potret Pendidikan

Statistik Indonesia. Hlm. 95.

Wahyu Hidayat R., *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hal.94